

Kelompok Informasi Masyarakat sebagai Media Kehumasan Desa: Pendekatan Komunikasi Islami di Era Digital

Nindia Galuh Prismadani¹, Andre Noevi Rahmanto², Sudarmo³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sebelas Maret

^{1,2,3} Jl. Ir. Sutami No.36A, Kentingan, Surakarta

¹ nindiagaluh@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan Komunitas informasi Masyarakat (KIM) sebagai humas di tingkat desa yang berorientasi untuk menyebarluaskan informasi yang akurat melalui diskusi internal terlebih dahulu dan memiliki tujuan agar masyarakat sekitar daerah KIM yang mana peneliti akan membahas Desa Biting, Ponorogo dapat berpartisipasi secara aktif. Hal ini digunakan agar masyarakat dapat berdaya untuk desanya sendiri. KIM dibentuk secara swadaya oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. KIM berjalan sesuai koridor yaitu untuk membangun komunikasi sosial dengan terus mengupayakan perbaikan dan pengembangan di dalam internal lembaga tersebut. Kemudian ini dapat dilihat dari website resmi milik Desa Biting yang mulai aktif dalam menyebarluaskan kegiatan Desa Biting sampai memberikan berita terkini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber data yang telah ada seperti data-data yang berkaitan dengan KIM. Metodologi atau Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah KIM di Desa Biting memiliki peran penting menjadi humas desa yaitu penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, yang mana ini memudahkan untuk komunikasi antar keduanya. Jadi KIM Desa Biting telah melaksanakan peran humas desa secara baik, karena telah berhasil memberdayakan masyarakat dengan ikut serta dalam pembangunan desa salah satunya yaitu keberhasilan dalam pembuatan website resmi milik KIM Desa Biting.

Kata Kunci: *Kelompok Informasi Masyarakat; Kehumasan*

Diterima: 05-12-2024

Disetujui: 18-01-2025

Dipublikasikan: 31-01-2025

Community Information Group as Village Public Relations Media: An Islamic Communication Approach in the Digital Age

Abstract

This study aims to determine the role of the Community Information Community (KIM) as public relations at the village level which is oriented to disseminate accurate information through internal discussions first and has the aim that the community around the KIM area where researchers will discuss Biting Village, Ponorogo can actively participate. This is used so that the community can be empowered for their own village. KIM is formed independently by and for the community itself. KIM runs according to the corridor, namely to build social communication by continuing to strive for improvement and development within the internal institution. Then this can be seen from the official website of Biting Village, which began to be active in disseminating Biting Village activities to provide the latest news. The research method used is descriptive qualitative method through literature study, namely data collection from existing data sources such as data related to KIM. The methodology or approach used in this paper uses a library research method or approach, while data collection is carried out by reviewing and/or exploring several journals, books, and documents (both printed and electronic) as well as other sources of data and or information that are considered relevant to the study. The conclusion in this study is that KIM in Biting Village has an important role in becoming village public relations, namely a liaison between the government and the community, which makes it easier for communication between the two. So Biting Village KIM has carried out the role of village public relations well, because it has succeeded in empowering the community by participating in village development, one of which is the success in creating an official website owned by Biting Village KIM..

Keywords: *Community Information Group; Public Relations*

PENDAHULUAN

Di era digital, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat, termasuk di tingkat desa. Kehadiran media digital memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan luas, sehingga mendorong desa untuk mengelola komunikasi dan informasi secara lebih efektif (Effendy, 2009). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam penyebaran informasi serta peningkatan partisipasi publik (Wahyudi, 2018).

Namun, seiring dengan transformasi digital, muncul tantangan baru dalam

pengelolaan komunikasi desa. Informasi yang tidak akurat atau bahkan hoaks dapat dengan mudah menyebar di ruang digital, sehingga peran KIM sebagai humas desa menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, pendekatan komunikasi Islami dapat menjadi solusi strategis untuk memastikan penyampaian informasi yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika masyarakat, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Ponorogo, yang dikenal memiliki akar tradisi Islam yang kuat (Lubis, 2016).

Komunikasi Islami menekankan prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan hikmah dalam penyampaian informasi (Jalaluddin, 2017). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam

peran KIM, humas desa dapat membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat, serta mengedukasi publik untuk menjadi lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di era digital.

Kabupaten Ponorogo, dengan kultur keagamaan yang kental, menjadi wilayah yang relevan untuk mengkaji bagaimana KIM dapat mengadopsi prinsip-prinsip komunikasi Islami dalam menjalankan peran kehumasan desa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, strategi, dan dampak penerapan komunikasi Islami dalam pengelolaan informasi desa, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan model komunikasi yang lebih etis dan inklusif di tingkat lokal (Anwar, 2020).

Perkembangan global saat ini yang berdampak signifikan pada teknologi informasi menyebabkan masyarakat berbenah. Teknologi informasi yang semakin ke arah kemajuan ini mendapatkan perhatian besar di sebuah lingkup hubungan antar masyarakat sehingga peran pemerintah juga diharapkan mampu menampung kebutuhan memberikan akses penunjang kebutuhan informasi itu sendiri. Teknologi informasi menjadi peluang dan tantangan tersendiri dalam era keterbukaan informasi saat ini. Keterbukaan informasi selalu berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang makin pesat.

Mengenai perkembangan teknologi berkaitan erat dengan diawali adanya revolusi industri. Revolusi industri adalah transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional yang menggunakan

tangan, lalu digantikan oleh mesin. Proses transisi tersebut memberikan dampak yang meluas pada kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. (Dewi, 2023)

Perkembangan industri yang semakin pesat dan membuat perubahan pada kehidupan masyarakat ialah agar memberikan berbagai manfaat yang dengan hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri, pekerja/buruh dan masyarakat secara keseluruhan. Adanya hal ini tujuan yang diharapkan yaitu masyarakat dapat tetap produktif dan terkoneksi antara satu dengan yang lain, memberikan informasi secara menyeluruh sampai memberikan kesejahteraan setiap manusia.

Mengenai perkembangan industri tersebut, salah satu hal yang dapat berkembang ialah peran kehumasan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat beserta potensi wilayahnya. Peran kehumasan ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang melakukan aktivitas pengelolaan informasi dan pemberdayaan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Pemerintah memberikan fasilitas dan perlindungan hukum mengenai hal ini dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pada era keterbukaan informasi, perkembangan Teknologi tak lepas dari pertukaran informasi yang menjadikan dunia seakan tanpa batas (Chandra et al., 2022). Desa sebagai unit terdekat dengan masyarakat juga sangat berdampak

pada keterbukaan informasi publik ini. Masyarakat memerlukan ruang dalam penyaluran informasinya, pun Desa juga memerlukan ruang untuk menyampaikan kinerja dalam pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Nasional mengatur tentang terbentuknya Kelompok yang memberikan ruang komunikasi antar warga masyarakat yang kemudian disebut Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Keterbukaan informasi yang merupakan aspek demokrasi yang didalamnya terdapat kebebasan dan hak asasi manusia dalam mendapatkan informasi yang benar. Oleh karenanya, setiap badan publik harus mampu membangun dan mengembangkan metode informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi secara baik dan efisien sehingga publik dimudahkan dalam mendapatkan informasi.

Suatu organisasi yang semakin kuat didukung oleh publik maka tujuan dari organisasi tersebut dapat dicapai dengan lebih mudah (Syarifuddin Gassing, 2016). Agar mendapatkan kesan positif dari masyarakat, maka peran kehumasan adalah untuk menciptakan kepentingan bersama yaitu dengan cara memberikan transparansi pada masyarakat dalam mengelola informasi.

Salah satu wadah yang mampu memberikan berbagai informasi yang khusus untuk mengetahui potensi wilayah dan pemberdayaan masyarakat ialah terbentuknya Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). KIM ialah komunitas

yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, komunitas ini dilakukan secara mandiri dan kreatif dalam pengelolaan informasi dan pemberdayaan untuk memberikan nilai tambah bagi suatu masyarakat di wilayah tertentu. Konsep dalam KIM bermakna komunikasi masyarakat yaitu proses penyampaian suatu pemikiran masyarakat yang ingin diutarakan kepada pemerintah untuk mempermudah proses sosialisasi demi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung suatu keputusan pemerintah yang sesuai dengan nilai Pancasila.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai komunitas masyarakat informasi yang memainkan peran strategis dalam merespon tantangan kemakmuran di Desa. Salah satu tujuan KIM adalah mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah serta dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi serta melakukan pemberdayaan masyarakat (Chandra et al., 2022). KIM memiliki berbagai macam fungsi yaitu sebagai wahana informasi, sebagai mitra dialog, sebagai peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta Teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat serta sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi (Dinas Komunikasi dan Informasi dan Statistik Kabupaten Ponorogo, 2023). Saat ini KIM saling teregistrasi se Indonesia dengan jumlah KIM sebanyak 1.486 dengan 3.022 anggota yang tersebar pada 1.410 Desa / Kelurahan (KIM, 2023).

Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah KIM terbanyak dengan jumlah

201. Dinas Kominfo Kabupaten Ponorogo terus melakukan pembinaan di Desa dan Kelurahan sehingga KIM di Kabupaten Ponorogo dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. KIM di Desa Biting adalah salah satu KIM yang aktif menyampaikan informasi terkait kegiatan desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melihat Peran kehumasan KIM di Desa.

Keberadaan dari KIM efektif untuk pemberian hak pada masyarakat dalam memperoleh informasi secara faktual dan bersifat pendayagunaan masyarakat agar mewujudkan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik serta mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Seperti yang diamanatkan dalam Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional yaitu Pemenkominfo tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh pemerintahan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota

KAJIAN PUSTAKA

Public relations (PR) dituntut untuk merespon cepat dan memonitoring secara berkelanjutan mengenai perkembangan isu yang ada di media sosial, terutama peran Government Public Relation (GPR) di Indonesia, khususnya pada Direktorat Jenderal-Ditjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI yang masuk ke dalam pusaran arus informasi yang membanjiri media sosial dengan hoaks (Mastel, 2017).

Peran kehumasan merupakan ujung tombak dalam penyampaian

suatu program pemerintah yang akan diusung. Amanat keterbukaan informasi memberikan peran kepada pemerintah untuk menciptakan citra positif yang diantaranya ialah meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi. Pengelolaan informasi ini ialah pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam program atau kegiatan yang berkaitan dengan publik yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dengan hal ini, masyarakat dapat mengetahui rencana pembentukan kebijakan publik.

Kehumasan atau *Public Relations* dalam kegiatannya membutuhkan komunikasi dengan memberikan hubungan timbal balik antara organisasi dengan publik. Menurut Effendy dalam (Rafiq, 2020) hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan publik untuk mendukung fungsi dan tujuan manajemen dalam memenuhi kepentingan bersama. Peran Humas dalam pemerintahan adalah berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, dengan tujuan agar pemerintah dapat mendengar suara dari masyarakat dan menyampaikan suara pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi.

Government Public Relations atau disebut juga Kehumasan Pemerintah memiliki peran yang sangat berpengaruh dan penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap tugas-tugas pembangunan pemerintah (Waluyo, 2020). Dengan adanya kehumasan pemerintah maka masyarakat dapat mengetahui perkembangan kinerja pemerintah dan perkembangan tentang informasi terkini mengenai pembangunan.

Masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan bersama-sama dengan pemerintahan. Humas Pemerintahan berperan sebagai komunikator publik yang memberikan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan pemerintah yang baik agar sejalan dengan keterbukaan informasi (Rosita & Sudomo, 2020). Setiap lembaga pemerintah wajib menyediakan sistem komunikasi publik agar masyarakat dapat mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber data yang telah ada seperti data-data yang berkaitan dengan KIM. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, 2015).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena yang dialami peneliti sebagai instrumen kunci penelitian dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang menggunakan metode ilmiah (Nasution, 2023). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan manusia dan sosial kemasyarakatan, bukan hanya mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas semata. Karakteristik dari kualitatif yaitu antara lain: (1) latar

yang alamiah, (2) peneliti adalah sebagai instrumen kunci, (3) bersifat deskriptif, (4) penelitian kualitatif lebih menekankan terhadap proses daripada hasil (5) analisis data dilakukan secara induktif (6) penelitian kualitatif lebih menekankan pada adanya makna (Bogdan, 1982). Objek penelitian ini ialah komunikasi sosial yang tertuang dalam komunitas informasi masyarakat (KIM) yang dibina oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Ponorogo yang memiliki sasaran utama masyarakat secara luas dan anggota KIM khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang melek informasi, peka terhadap potensi wilayahnya dan aktif dalam menyebarkan informasi yang berwawasan.

Wilayah yang menjadi objek penelitian ialah Desa Biting yang terletak di Badegan, Ponorogo. Wilayah tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam karena terdapat sekelompok masyarakat yang aktif dalam mengelola website dalam mengupayakan penyebarluasan potensi daerah yang dimiliki, sehingga mencerminkan adanya masyarakat aktif, mandiri dalam melakukan pendayagunaan masyarakat dan daerahnya.

Peran kehumasan yang dilakukan oleh KIM adalah sebagai suatu pintu gerbang yang mengawali keterbukaan informasi. Hal ini menjadi harapan yang tinggi bagi masyarakat dengan menjadi sebuah wadah yang dapat menampung berbagai aspirasi dari masyarakat dan dapat menjadi bagian dari mitra pemerintah yang menjalankan fungsi kehumasan. KIM memiliki peran dalam mewujudkan desa yang aktif, mandiri melakukan kegiatan untuk melakukan akses penyampaian dan penerimaan

informasi. Oleh karenanya, KIM memiliki tujuan untuk bertukar pengalaman dalam pendayagunaan informasi. KIM berperan sebagai penyebaran informasi apabila informasinya telah diolah dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Kegiatan yang dilakukan KIM juga banyak menyerap aspirasi masyarakat, yang dapat dilakukan pertemuan secara formal maupun informal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori dan konsep dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, buku referensi dan dokumen yang ada kaitannya dengan ruang lingkup sebagai landasan pemikiran dan pembahasan (Nasution K. d., Peranan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Deli Serdang, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Badegan yang mana penulis memfokuskan untuk penelitian adalah Desa Biting yang merupakan salah satu desa di kecamatan tersebut. Kecamatan Badegan ialah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa ini memiliki beberapa wisata destinasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Salah satu wisata yang dapat disebutkan ialah wisata buatan yaitu bernama Sumorobangun Flowers (SBF). SBF menawarkan wisata yang kekinian dan menarik bagi masyarakat dengan adanya kearifan lokal ala Desa Biting, adanya gazebo yang digunakan untuk bersantai, patung-patung binatang dan pemandangan taman buatan serta adanya

jembatan penghubung yang berhasil viral di media sosial dengan jembatan pelangi serta disediakan pusat kuliner dan oleh-oleh khas Bumi Reyog Ponorogo.

Selain adanya wisata SBF terdapat beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan Desa Biting, seperti Bukit Soeharto, wisata desa, wisata edukasi sampai adanya pelatihan dan materi yang disuguhkan tarian Bujang Ganong, Kelono Sewandono dan Jathil untuk usia sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dari sanggar Tresno Budoyo asli Desa Biting, wisata religi dan terdapat sungai yang dijadikan potensi wisata serta pasar wisata Biting. Hal ini adalah bukti bahwa pemerintah beserta masyarakat yang tergabung dalam KIM menginginkan Desa Biting menjadi desa destinasi yang informasinya dapat menyebar ke seluruh Ponorogo untuk memberikan manfaat bagi masyarakatnya (Ponorogo, n.d.).

Berdasarkan Permenkominfo No. 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial yang menyatakan bahwa kelompok informasi masyarakat (KIM) merupakan kelompok yang dibentuk secara swadaya dari dan untuk masyarakat yang bertugas untuk mengelola informasi dan juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Menurut Direktorat Kelembagaan dan Komunikasi Sosial yang menyatakan KIM adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari dan oleh untuk masyarakat yang orientasinya kepada layanan informasi dan bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut,

KIM merupakan wadah yang disediakan untuk masyarakat terutama di desa untuk memperoleh layanan informasi dan juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat membantu perkembangan desa menjadi lebih baik, dan dapat mengikuti perkembangan teknologi (Putu Nomy Yasintha, 2021).

KIM memiliki berbagai aktivitas yang dilakukan. Aktivitas pokok yang ada di KIM yaitu memberikan akses informasi yang mana KIM dapat mengakses informasi dari berbagai sumber baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi yang diperoleh KIM wajib untuk dilakukan diskusi terlebih dulu bersama dengan tim KIM sebelum nantinya disebarluaskan kepada masyarakat, maka KIM terlebih dahulu menyaring dan memastikan bahwa informasi yang akan disampaikan adalah informasi yang akurat. Aktivitas yang lainnya adalah salah satunya membangun networking atau berjejaring.

Salah satu tugas KIM adalah membangun jaringan kelembagaan dengan institusi lain yang berguna bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar lingkungan KIM. Keseluruhan informasi dan pengetahuan yang diperoleh KIM harus di desiminasi-kan yakni suatu proses yang mana penyebarluasan informasi setelah informasi tersebut diolah secara saksama dan diperiksa kebenarannya. Selain itu tugas KIM yaitu sebagai wadah aspirasi yang mana KIM diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, lalu diteruskan kepada pemerintah maupun stakeholder terkait.

Keberadaan KIM sangat efektif untuk menangkal hoax, karena anggota KIM diharuskan menggali informasi se-akurat

mungkin. Hal ini jelas bahwa dengan adanya KIM, masyarakat terlatih untuk mencari kebenaran fakta dari informasi yang disajikan atau akan disebarluaskan. Masyarakat menjadi peduli terhadap penyebaran informasi dan keterbukaan informasi yang menjadi hak dari segala bangsa. KIM berperan sebagai fasilitator apabila ternyata terjadi kesenjangan komunikasi dan informasi (Tobari, Nusantara, 2022).

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa KIM memiliki peran yaitu sebagai fasilitator apabila terjadi adanya kesenjangan antara komunikasi dan informasi, ini adalah salah satu peran yang dimiliki oleh KIM. Penting untuk dimengerti karena KIM merupakan wadah yang dibentuk menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, dengan adanya KIM masyarakat itu sendiri yang ikut serta dalam melihat potensi daerahnya masing-masing, masyarakat dapat ikut aktif dalam memikirkan akan membawa informasi apa untuk diposting dalam halaman websitenya.

Desa Biting memiliki KIM yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam hal ini ialah keterbukaan informasi. Terutama saat ini memasuki reformasi yang menuntut penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat transparan dan akuntabel bagi publik. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak yang wajib dimiliki oleh warga negara dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri khas negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik selain itu juga mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik.

Para anggota KIM dapat mengambil peran sebagai agen pembangunan yang mana juga sebagai mitra dialog pemerintah. Lembaga ini dapat memiliki nilai tawar di bidang ekonomi, sosial, budaya yang melalui aktivitas perdagangan, pertanian dan industri. KIM menguatkan peran masyarakat karena masyarakat disini ikut aktif mengawal keberlangsungan lembaganya sehingga harus terus menerus dapat menjawab tantangan zaman. KIM juga dapat menyebarkan informasi yang dituangkan ke dalam berita. Informasi yang termasuk berita harus ditulis berdasarkan berita yang mendidik, dapat memberikan inspirasi, tidak mengandung provokasi apalagi mengandung hoax.

Keberadaan KIM merupakan cerminan dari partisipasi masyarakat yang utamanya terhadap pembangunan di tingkat desa. Partisipasi masyarakat penting untuk diutamakan karena masyarakat di daerahnya tersebut yang mengerti dengan potensi dari daerahnya sendiri dan bagaimana masyarakat dapat melakukan hal yang terbaik bagi desanya tersebut.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebagai humas desa, KIM tidak hanya bertugas menyebarkan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan relevan bagi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Islami, peran ini selaras dengan nilai **tabligh**, yakni menyampaikan kebenaran secara jelas dan amanah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin." (QS. Al-Ahzab: 47).

Dalam era digital, tantangan terbesar yang dihadapi KIM adalah keberadaan informasi palsu (hoaks). Oleh karena itu, tugas KIM sebagai humas desa menjadi lebih berat untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan telah melalui proses verifikasi. Prinsip **sidq** (kejujuran) dalam Islam menjadi landasan penting dalam mengelola komunikasi, sebagaimana firman Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." (QS. Al-Ahzab: 70).

Beberapa tantangan yang dihadapi KIM dalam menjalankan peran kehumasan desa meliputi:

1. Minimnya Literasi Digital: Sebagian anggota masyarakat desa, terutama yang lebih tua, belum sepenuhnya memahami bagaimana menggunakan teknologi informasi secara bijak. Dalam konteks ini, KIM dapat menerapkan prinsip hikmah (kebijaksanaan) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini harus dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan masyarakat.
2. Penyebaran Hoaks: Era digital memudahkan penyebaran berita palsu yang dapat memecah belah masyarakat. KIM harus mengintegrasikan nilai amanah (dapat dipercaya) dalam setiap informasi yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

"Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat." (HR. Bukhari).

Potensi besar KIM terletak pada kemampuannya untuk menjadi fasilitator

komunikasi yang berbasis nilai-nilai Islam. Dengan membangun kepercayaan masyarakat melalui penyampaian informasi yang benar dan etis, KIM dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa.

Komunikasi Islami tidak hanya berbicara tentang isi pesan, tetapi juga tentang cara penyampaiannya. Prinsip **ma'ruf** (hal yang baik) harus menjadi pedoman utama. Dalam praktiknya, KIM dapat mengembangkan strategi komunikasi berbasis digital yang tidak hanya efektif tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti:

1. Transparansi dan Kejujuran: Informasi yang disampaikan harus benar, sesuai dengan fakta, dan tidak berlebihan.
2. Keadilan dalam Penyampaian: Semua kelompok masyarakat harus mendapatkan akses informasi yang sama, tanpa diskriminasi.
3. Etika dalam Berkomunikasi: Bahasa yang digunakan dalam komunikasi harus sopan, santun, dan tidak menyinggung pihak lain.

Kabupaten Ponorogo, yang memiliki tradisi keislaman yang kuat, memberikan peluang besar untuk mengembangkan model kehumasan berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini tidak hanya relevan bagi keberhasilan program-program pemerintah desa, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi wilayah lain. Model ini dapat mencakup:

1. Pelatihan Literasi Digital Islami bagi anggota KIM untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola informasi.
2. Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Dakwah: Media sosial dapat menjadi platform untuk menyebarkan

pesan-pesan Islami yang mendidik dan memberikan solusi bagi masalah masyarakat.

3. Kemitraan dengan Tokoh Agama: Untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KIM, melibatkan tokoh agama lokal dapat menjadi langkah strategis.

KIM yang ada di tingkat desa, khususnya desa yang penulis pilih yaitu Desa Biting, tidak hanya suatu lembaga yang membantu dalam menyalurkan informasi, tetapi peran KIM juga ada dalam membantu masyarakat desa untuk lebih aktif, partisipatif dan terlibat dalam segala kegiatan yang orientasinya untuk membangun desa. KIM dapat menjadi penggerak untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat desa dalam beberapa aspek karena KIM selain sebagai lembaga informasi juga sebagai lembaga pemberdayaan desa.

Hal ini telah sedikit banyak dilakukan oleh KIM Desa Biting yang memberikan porsi partisipasi masyarakat sehingga komunikasi sosial dapat terjalin dengan cepat, sehingga orientasi KIM Desa Biting menunjukkan bahwa terdapat keinginan kuat untuk mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola desanya lebih baik lagi. Meskipun terdapat beberapa hal yang kurang dalam pengelolaan website KIM di Desa Biting, namun hal itu tidak menjadi masalah besar karena dapat diperbaiki dan dapat diolah menjadi baik dan memiliki arah kemajuan di era digital.

Adanya KIM juga dapat membantu masyarakat untuk banyak terlibat dalam mencari tahu kebutuhan dari desa untuk meningkatkan pembangunan di desa, diharapkan lebih aktif dalam forum-forum

pembangunan desa. KIM juga dapat membantu masyarakat dalam turut serta memantau semua kegiatan layanan publik yang disana dapat fasilitas untuk melakukan pelaporan apabila terjadi kekurangan dalam layanan publik. Diketahui kembali, fungsi dari KIM adalah dalam mendedukasi kepada masyarakat dan meningkatkan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan desa apakah pembangunan tersebut telah sesuai dengan perencanaan atau belum sesuai. Adanya KIKM tidak hanya sebagai lembaga penyebar informasi yang tersedia namun juga bagaimana KIM berperan untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami segala informasi publik. KIM berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya informasi, masyarakat dapat dibantu memahami bahwa setiap informasi itu penting untuk pembangunan desa yang akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, memiliki jejaring yang dapat membantu masyarakat desa mendapatkan akses lebih mudah dan untuk mendayagunakan informasi yang masyarakat peroleh. Pada akhirnya, output dari KIM salah satunya ialah kemampuan untuk meningkatkan potensi masyarakat sebagai pengawas informasi di desa yang bersangkutan.

Gambar 1 : laman depan website KIM Desa Biting



Gambar 2. laman depan berisi berita terakhir



Secara garis besar, tujuan dari adanya website ini telah terlaksana dan tercapai. Target untuk KIM ini sendiri ialah memberikan informasi dengan menyesuaikan zaman yang berkembang yaitu pada era digital. Hal ini masih dapat terus diperbaiki dan dikembangkan agar penyajian informasi ini dapat menarik perhatian masyarakat secara lebih luas dan masyarakat sekitar Desa Biting juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam ranah komunikasi sosial.

KESIMPULAN

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) saat ini dibutuhkan keberadaannya karena lembaga ini berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. KIM dibentuk secara swadaya oleh masyarakat desa itu sendiri, jadi KIM ada karena ada masyarakat yang tujuannya juga untuk masyarakat. Keberadaan KIM khususnya di Desa Biting mendapatkan peran yang strategis untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan turut membantu menyebarkan informasi yang akurat. Capaian yang terdapat di KIM Desa Biting dapat terlihat di website resminya yang sudah aktif untuk menyajikan berbagai

informasi antara lain ialah penyajian berita terkini, dokumentasi kegiatan, dan pemberian informasi terkait potensi yang ada di desa tersebut. Hal ini menyimpulkan bahwa KIM sebenarnya juga dapat berperan sebagai humas desa yang aktif dalam penyajian informasi secara akurat dan selain itu juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam melakukan komunikasi sosial.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, terutama dalam era digital yang menuntut pengelolaan informasi yang cepat, akurat, dan efektif. Dalam menjalankan fungsi kehumasan desa, KIM menghadapi berbagai tantangan, seperti literasi digital yang rendah dan penyebaran informasi palsu (hoaks).

Pendekatan komunikasi Islami menawarkan solusi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Nilai-nilai Islam seperti **sidq** (kejujuran), **amanah** (dapat dipercaya), **hikmah** (kebijaksanaan), dan **ma'ruf** (kebaikan) menjadi landasan penting dalam penyampaian informasi yang etis, bermakna, dan bermanfaat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, KIM tidak hanya mampu meningkatkan kualitas komunikasi desa, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnan. (2019). Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Soshum Insentif*.
- Bogdan, R., C., & Biken, S., K. (1982). *Qualitative Research for Education*, Na Introduction to Theories and Method. Pearson.
- Chandra, A., Tinggi, S., & Masyarakat, P. (2022). MENUJU DESA KOMUNIKATIF MELALUI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM). In *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan* (Vol. 1, Issue 1).
- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo. (2020). Ayo Ke Ponorogo. <https://disbudparpora.ponorogo.go.id/wisata-biting-mendapatkan-kunjungan-2000-wisatawan-di-akhir-pekan/>
- Dinas Komunikasi dan Informasi dan Statistik Kabupaten Ponorogo. (2023, December 20). Kelompok Informasi Masyarakat. <https://kominfo.ponorogo.go.id/Kim/>.
- Effendy, Onong Uchjana. (2009). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ferdiand Kalesaran. (2015). Partisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado. *E-Journal UNSRAT*
- Jalaluddin. (2017). *Psikologi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Johantan Alfando. (2013). Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Sidomulya Kec. Anggana Kutai Kertanegara. *Jurnal Ilkom Fisip UNMUL*.
- KIM. (2023, December 20). Tentang Kami. <https://kim.id/tentang-kami>.
- Lubis, Akhyar Yusuf. (2016). *Komunikasi Islami: Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Kencana.

- Mastel. (2017). Hasil Survei Matel tentang Wabah Hoax Nasional. <https://mastel.id/hasil-survei-wabah-hoax-nasional-2017/>
- Nasution, Kasiatik dan Irwan. (2015). Peranan Kelompok Informasi Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.
- Nasution. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. CV. Harfa Creative.
- Putu Nomy Yasintha dkk. (2021). Kelompok Informasi Masyarakat Sebagai Model Partisipasi Publik dalam Keterbukaan Informasi di Tingkat Desa di Bali. *JIPA Vol. 1 No. 1*
- Rafiqa, M. (2020). PERAN HUMAS PEMERINTAH SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI PUBLIK (STUDI PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL PEMERINTAH KOTA BOGOR). *UG JURNAL*, 14(7), 9–17.
- Rizky Dewi, (2023). Apa itu Revolusi Industri? Ini Sejarah, Perkembangan dan Dampaknya.
- Rosita, R., & Sudomo, A. (2020). Tugas Kehumasan Kepala Seksi Kesejahteraan di Kantor Desa Ragemanunggal Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. *JURNAL MAHASISWABINA INSANI*, 4(2), 135–144.
- Setiawan & Padmaningru. (2020). Toward the Design of Village Information System As a Villager Communication Medium. *International Journal of Multi Science*.
- Suranto, Aw. (2011). Komunikasi Sosial Budaya: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syarifuddin Gassing. (2016). Public Relations. Yogyakarta. ANDI.
- Tobari. (2022). Maksimalkan Peran KIM, Kominfo Ponorogo Gelar Bimtek Pemanfaatan Platform Digital. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/662851/maksimalkan-peran-kim-kominfo-ponorogo-gelar-bimtek-pemanfaatan-platform-digital?show=>
- Wahyudi, Syamsul. (2018). “Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Meningkatkan Literasi Informasi Desa”. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, 5(2), 75-88.
- Walidin, Saifullah & Tabrani. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. FTK Ar-Raniry Press
- Waluyo, D. (2020). TINJAUAN PERAN GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 UNTUK BERSIKAP MILENIAL. *MAJALAH SEMI ILMIAH POPULER KOMUNIKASI MASSA*, 1(1), 11–20.
- Windyaningrum Rubiayasih. (2016). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa. Universitas Terbuka